Katalog: 4102004.1222 ISSN: 3031-4747

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kabupaten Labuhanbatu Selatan







Katalog: 4102004.1222

ISSN: 3031-4747

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kabupaten Labuhanbatu Selatan

2024
Volume 8,2024



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 2024

ISBN : -

Katalog : 4102004 1222
No. Publikasi : 12220.24020
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 69 halaman

Naskah:

BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Penyunting Naskah:

BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Gambar Kulit:

BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dicetak oleh:

_

[&]quot;Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik"

TIM PENYUSUN

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024

Penanggung Jawab:

Bahar Arif Lubis, S.E., M.Si

Editor:

Trigels Archelia Br Barus, S.Tr.Stat.

Penulis & Pengolah Data:

Ervina Jayanti Siagian, SST

Desain/Layout:

Ervina Jayanti Siagian, SST

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah dapat menyelesaikan penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024. Publikasi ini disajikan dalam bentuk analisis, yang menggambarkan kondisi kesejahteraan rakyat yang mencakup aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan lingkungan, serta Teknologi Informasi Komunikasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur, memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai aspek kesejahteraan rakyat di Provinsi Sumatera Utara. Diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan untuk menentukan arah kebijakan serta sebagai alat penilaian dan pemantauan terhadap pencapaian program pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat terwujud. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Kotapinang, 16 Desember 2024

Kepala

Bahar Arif Lubis, S.E., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PE	NGANTAR	v
DAFTAR	ISI	vii
DAFTAR	TABEL	ix
DAFTAR	GAMBAR	x i
BAB 1 P	ENDAHULUAN	
1.1	Latar BelakangTujuan	3
1.2	Tujuan	4
1.3	Sumber data	4
1.4	Sistematika Penyajian	4
BAB 2 K	ONSEP DAN DEFINISI	
2.1.	Kependudukan	9
2.2.	Kesehatan	10
2.3.	Pendidikan	
2.4.	Ketenagakerjaan	11
2.5.	Taraf dan Pola Konsumsi	
2.6.	Perumahan dan Lingkungan	
2.7.	Kemiskinan	
	EPENDUDUKAN	
3.1.	Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin	
3.2.	Persebaran dan Kepadatan Penduduk	
3.3.	Status Perkawinan	
	Keluarga Berencana	
3.4.		
	ESEHATAN	
4.1.	Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	32

4.2.	Tingkat Imunitas dan Gizi Balita	. 34
BAB 5 PI	ENDIDIKAN	. 41
5.1.	Angka Melek Huruf	. 43
5.2.	Status Pendidikan Penduduk	. 44
5.3.	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	. 45
BAB 6 KI	ETENAGAKERJAAN	. 49
6.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tiingkat Penganggurar Terbuka (TPT)	
6.2.	Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan	. 52
6.3.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	. 53
6.4.	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan	. 54
BAB 7 TA	ARAF DAN POLA KONSUMSI	. 57
7.1.	Perkembangan Pola Konsumsi	. 57
7.2.	Pengeluaran Per Kapita	. 58
BAB 8 PI	ERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	. 61
8.1.	Kondisi dan Fasilitas Rumah Tinggal	. 62
BAB 9 KI	EMISKINAN	. 67
9.1	Perkembangan Penduduk Miskin	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Labu	uhanbatu Selatan
menurut Kecamatan, 2023-2024	21
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan n	nenurut
Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2024	22
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, o	lan Kepadatan
Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuha	ınbatu Selatan
Tahun 2024	24
Tabel 3. 4 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas menurut Sta	tus Perkawinan
di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2024	25
Tabel 6. 1 Penduduk Usia Kerja, Tingkat partisipasi Angkatan ke	erja (TPAK),
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten La	abuhanbatu
Selatan Tahun 2024	51
Tabel 6. 2 Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidik	an di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2024	52
Tabel 6. 3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bel	kerja Menurut
Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha Tahun 2024	53
Tabel 6. 4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bel	cerja Menurut
Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan Tahun 2024	54
Tabel 8. 1 Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi dan Fasi	litas Rumah
Tinggal di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 20	23/2024 64
Tabel 9. 1 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparaha	n Kemiskinan
(P2) dan Garis Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu S	Selatan Tahun
2021-2024	69

DAFTAR GAMBAR

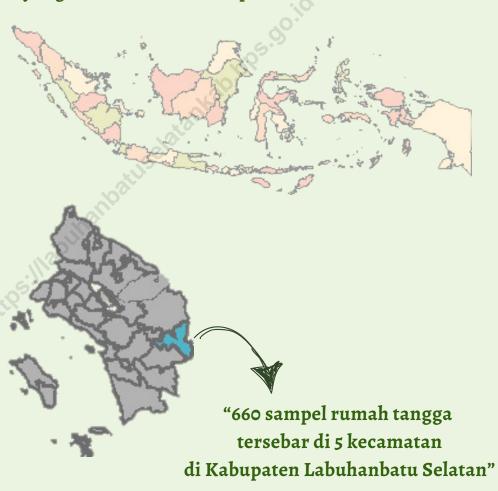
Gambar 3. 1 Perkembanga	n Jumlah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
2021-2024	20
Gambar 3. 2 Persentase Pe	erempuan berumur 15-49 pernah kawin menurut
partisipasi KB	Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 202427
Gambar 4. 1 Tingkat Morb	iditas Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
2024	32
Gambar 4. 2 Perkembanga	n Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten
Labuhanbatu	Selatan, 2021-202433
Gambar 4. 3 Pesentase Wa	nita 15-49 Tahun Pernah Kawin menurut Penolong
Kelahiran Ana	ak Lahir Hidup Terakhir, 202434
Gambar 4. 4 Persentase W	anita 15-49 Tahun Pernah Kawin menurut Tempat
Kelahiran Ana	ak Lahir Hidup Terakhir, 202435
Gambar 4. 5 Pesentase Wa	nita 15-49 Tahun Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun
Terakhir men	urut Berat Badan Bayi, 202436
Gambar 5. 1 Kemampuan	Membaca dan Menulis Penduduk Usia 15 Tahun ke
atas Kabupat	en Labuhanbatu Selatan (Persen), 202444
Gambar 5. 2 Persentase Pe	enduduk 7-23 Tahun menurut Status Pendidikan
Kabupaten La	buhanbatu Selatan (Persen), 202445
Gambar 5. 3 Persentase Pe	enduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan Usia 15
Tahun Keatas	Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2024 46
Gambar 7. 1 Rata-rata Pen	geluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok
Penduduk di	Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 202458
Gambar 7. 2 Rata-rata Pen	geluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan
Makanan di k	abupaten Labuhanbatu Selatan (Rupiah), 2024 58

Gambar 9. 1 Tren Persentase F	Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2015-2024	68



Pendahuluan

Sampel Susenas Maret 2024 sebesar 345.000 rumah tangga yang tersebar di 514 kabupaten/kota se-Indonesia



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bangsa merupakan komitmen seluruh Bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara eksplisit, komitmen tersebut telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk Nasional. Pada tatanan daerah dokumen tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, politik dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan merupakan komitmen seluruh bangsa Indonesia yang telah diamatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Perencanaan, implementasi dan evaluasi hasil pembangunan, akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan data dan informasi statistik yang baik. Berdasarkan data dan informasi yang dikemas melalui indikator makro, perencanaan pembangunan dan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berlandaskan pola pikir demikian, diperlukan gambaran mengenai kondisi lapangan terkait indikator kesejahteraan rakyat untuk melihat berbagai indikator keluaran pembangunan.

Pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan, baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan daya saing, mampu berkompetisi dengan memanfaatkan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal. Pembangunan

manusia bertujuan agar masyarakat memiliki kompetensi yang tinggi, berintegritas dan religius.

1.2 Tujuan

Penulisan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi setiap aspek kesejahteraan rakyat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Indikator ini dapat dijadikan sebagai kompas yang tepat untuk memonitor pencapaian kesejahteraan rakyat.

Melalui analisis Indikator Kesejahteraan Rakyat, perencana dan pelaksana maupun pengamat mendapatkan kejelasan mengenai kondisi berbagai dimensi kehidupan yang ada sebagai hasil dan target pembangunan di masa mendatang. Selanjutnya, rencana maupun kebijakan yang disusun akan bersifat efektif dan efisien, utamanya untuk segera melaksanakan suatu aksi nyata terhadap suatu kondisi yang berdasarkan indikator-indikator yang ada. Pada akhirnya usaha Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan.

1.3 Sumber data

Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data primer Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari sensus dan survei, yaitu Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan survei lainnya yang telah dilaksanakan.

1.4 Sistematika Penyajian

Publikasi ini secara umum menyajikan data dan analisis Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024. Penyajian data dan analisis dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam sembilan bagian.

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, maksud dan tujuan, sumber data, dan sistematika penyajian publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024. Bagian kedua berisi penjelasan teknis yang berisi konsep definisi yang digunakan. Selanjutnya, penyajian aspek kependudukan yang mencakup jumlah dan pertumbuhan penduduk serta kepadatan/ penyebaran penduduk disajikan pada bagian ketiga. Bagian keempat publikasi ini memaparkan kondisi kesehatan yang mencakup status kesehatan penduduk dan indikator makro kesehatan lainnya, kemudian dilanjutkan pembahasan kondisi pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dari sisi kualitas pendidikan penduduk pada bagian lima. Aspek ketenagakerjaan dibahas pada bagian enam. Aspek pola konsumsi akan dibahas pada bagian tujuh, dilanjutkan aspek perumahan pada bagian delapan. Pembahasan ditutup dengan pembahasan kemiskinan pada bagian sembilan. https://abiliabilinanbatuse



BAB Konsep & Defenisi









PENDIDIKAN







POLA KONSUMSI

PERUMAHAN





KEMISKINAN

BAB 2 KONSEP DAN DEFINISI

2.1. Kependudukan

- Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.
- Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi.
- Rata-rata laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu.
 Angka dinyatakan sebagai persentase dari penduduk pada tahun tertentu (dasar).
- Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk lakilaki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.
 Rasio dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.
- Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio) adalah Angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan banyaknya orang yang termasuk usia produktif (umur 15-64 tahun).
- Peserta keluarga berencana (akseptor) adalah orang yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi.

2.2. Kesehatan

- Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau lainnya. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.
- **ASI eksklusif** adalah pemberian ASI saja tanpa makanan dan minuman lain selama 6 bulan pertama kehidupan bayi.
- Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah bayi diberi kesempatan mulai (inisiasi)
 menyusu sendiri segera setelah bayi lahir (dini) dengan meletakkan langsung
 bayi yang baru lahir di dada ibunya dan membiarkan bayi merayap untuk
 menemukan puting susu ibu untuk menyusu.
- Metode Kontrasepsi adalah cara/alat kontrasepsi yang dipakai untuk mencegah kehamilan.
- Anak lahir hidup adalah anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan walaupun hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernapas dan menangis.

2.3. Pendidikan

- Sekolah adalah kegiatan belajar di sekolah formal dan non formal (Paket A, B, dan C) mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.
- Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- Masih bersekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.

- **Tidak sekolah lagi** adalah mereka yang pernah bersekolah tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.
- Tamat sekolah adalah menyelesaikan pendidikan pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan yang pernah diikuti (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diikuti oleh seseorang yang masih sekolah.
- Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan)
 adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh
 seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang
 vang masih sekolah.
- Dapat membaca dan menulis adalah mereka yang dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan sesuatu huruf. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille dan orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan dapat membaca dan menulis. Sedangkan orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis, dianggap tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf).

2.4. Ketenagakerjaan

- Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
- Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
- Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.
- Kegiatan yang terbanyak dilakukan adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibandingkan dengan kegiatan lainnya.

- Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi.
- Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panenan, mogok dan sebagainya.
- Penganggur terbuka, terdiri dari :
 - a. Mereka yang mencari pekerjaan.
 - b. Mereka yang mempersiapkan usaha.
 - c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
 - d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.
- Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/ perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja.
- Status Pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan
- Jenis pekerjaan/jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja.
- Jam Kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun keatas).
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

2.5. Taraf dan Pola Konsumsi

- Konsumsi/pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk kebutuhan (konsumsi) semua anggota rumah tangga. Secara umum pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi pengeluaran untuk makanan (pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau) dan bukan makanan (pengeluaran untuk perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak dan pesta)
- Konsumsi rata-rata per kapita setahun, diperhitungkan dari konsumsi ratarata per kapita dalam seminggu dikalikan dengan 30/7 x 12
- Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan, mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi yang dikonsumsi di luar rumah, termasuk minuman, tembakau dan sirih dalam jangka waktu sebulan.

2.6. Perumahan dan Lingkungan

- Bangunan fisik adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
- Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri.
- Luas lantai adalah luas lantai dari bangunan tempat tinggal atau jumlah dari setiap bagian tempat tinggal yang ditempati oleh anggota rumah tangga dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
- Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.

- Atap adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami dibawahnya dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
- Air leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum).
- Air sumur/mata air terlindung adalah bila lingkar mulut sumur/mata air tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkar mulut/perigi.

2.7. Kemiskinan

- Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).
- Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM).
- Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
- Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilaipengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori (kkalori) per kapita per hari.

- Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.
- Sangat miskin adalah mereka yang konsumsi per kapita per bulan berada di bawah 0,8 x Garis Kemiskinan (GK).
- Miskin adalah mereka yang konsumsi per kapita per bulan berada di antara
 0,8 GK dan 1 GK.
- **Hampir miskin** adalah mereka yang konsumsi per kapitaper bulan berada di antara 1 GK dan 1,2 GK.
- Rentan miskin adalah mereka yang konsumsi per kapita per bulan berada di antara 1,2 GK dan 1,6 GK



Kependudukan



Jumlah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2024

336.577 jiwa

"Persentase Penduduk Labuhanbatu Selatan menurut Jenis Kelamin, 2024"



50,96% 49,04% Laki-laki Perempuan Sebaran Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut Kecamatan, 2024



Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Status Perkawinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2024



38.88%

•

54,81%

14

6,31%

KAWIN

BELUM KAWIN

CERAI HIDUP/MATI

BAB 3 KEPENDUDUKAN

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

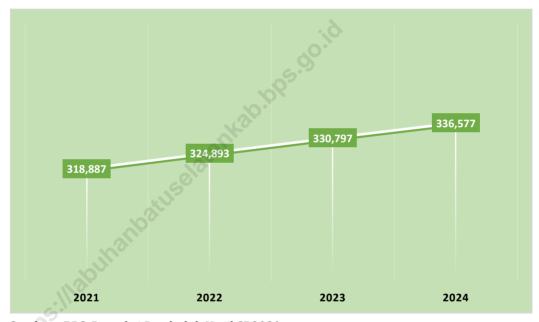
Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diitingkatkan.

3.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan tercatat sebesar 312.775 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjumlah 324.893 jiwa. Dan pada tahun 2023 penduduk Labuhanbatu Selatan naik menjadi 330.797 jiwa dan 336.577 pada tahun 2024

Gambar 3. 1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021 - 2024



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Hasil SP2020

Pada Tabel 3.1, ditampilkan jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut Kecamatan. Kecamatan Torgamba, Kotapinang, dan Kampung Rakyat merupakan tiga kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak, masing-masing berjumlah 115.165, 68.943 dan 64.566 jiwa pada tahun 2024. Dilihat pertumbuhan penduduknya tahun 2023-2024, Kecamatan yang relatif tinggi pertumbuhannya adalah Kecamatan kotapinang sebesar 2,27 persen. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Kotapinang cenderung

disebabkan daerah ini menjadi pusat perkembangan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tabel 3. 1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut Kecamatan, 2023-2024

Kecamatan		Jumlah Penduduk (Jiwa)		Pertumbuhan	
		2023 2024		Penduduk 2023-2024	
				(%)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Sungai Kanan	50 148	50 729	1,16	
2.	Torgamba	115 165	116 953	1,55	
3.	Kotapinang	68 943	70 509	2,27	
4.	Silangkitang	31 975	32 402	1,34	
5.	Kampung Rakyat	64 566	65 984	2,20	
Labuhanbatu Selatan		330 797	336 577	1,75	

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Hasil SP2021

Pada Tabel 3.2, ditampilkan jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut kecamatan dan jenis kelamin tahun 2024. Kecamatan Torgamba merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu mencapai 116.953 jiwa. Sebaliknya Kecamatan Silangkitang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu berjumlah 32.402 jiwa.

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2024

Kecamatan		Laki-Laki Perempuan		Laki-Laki +	Sex
		Laki-Laki	Perempuan	Perempuan	Ratio
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sungai Kanan	25 833	24 896	50 729	103,76
2.	Torgamba	59 695	57 258	116 953	104,26
3.	Kotapinang	35 869	34 640	70 509	103,55
4.	Silangkitang	16 408	15 994	32 402	102,59
5.	Kampung Rakyat	33 708	32 276	65 984	104,44
Lab	uhanbatu Selatan	171 513	165 064	336 577	103,91

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Hasil SP2021

Besar kecilnya rasio jenis kelamin dipengaruhi oleh pola mortalitas dan migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut. Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Labuhanbatu Selatan umumnya lebih banyak dari penduduk perempuan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2024 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebesar 336.577, yang terdiri dari 171.513 jiwa laki-laki dan 165.064 jiwa perempuan atau dengan *sex ratio* sebesar 103,91. Perbedaan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan sangat sedikit, berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat hampir 103-104 penduduk laki-laki.

Jika dilihat menurut kecamatan, rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan Kampung Rakyat yaitu sebesar 104,44. Hal ini menunjukkan, di Kecamatan Torgamba, setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 - 105 penduduk laki-laki. Hal ini kemungkinan karena adanya perkebunan kelapa sawit, sehingga banyak perkerja laki-laki. Sedangkan rasio jenis kelamin yang terendah

di Kecamatan Silangkitang yaitu 102,59. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan, terdapat 102 - 103 penduduk laki-laki di Kecamatan Silangkitang.

3.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu masalah kependudukan lainnya yang cukup serius adalah persebaran penduduk yang tidak merata antar daerah, sehingga kepadatan untuk masing-masing kabupaten/kota belum merata. Kepadatan penduduk biasanya berpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk wilayah perdesaan untuk berusaha di daerah perkotaan. Ketidakmerataan atau ketimpangan sebaran penduduk tampak lebih jelas jika dikaitkan dengan besarnya variasi luas antar daerah. Masalah sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Potret tingkat kepadatan penduduk yang tinggi umumnya terkonsentrasi di daerah kota yang memiliki ketersediaan fasilitas yang mencukupi dan memadai. Faktor inilah yang merupakan pendorong penduduk untuk melakukan perpindahan (migrasi). Penyebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga tidak heran jika daerah perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kepadatan penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024 sebesar 93,60 penduduk per kilometer persegi.

Kecamatan Kotapinang, sebagai ibu kota Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang luasnya 556,71 kilometer persegi, dihuni oleh 70.509 jiwa. Walaupun luas Kecamatan Kotapinang hanya 15,48 persen dari luas daratan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tetapi penduduk yang tinggal di Kotapinang mencapai 20,95 persen dari total penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kotapinang

merupakan Kecamatan terpadat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang setiap kilometer perseginya ditempati hampir sekitar 126,65 jiwa, disusul Kecamatan Silangkitang sebesar 92,45 jiwa/km2. Selanjutnya kecamatan Sungai Kanan dengan luas hanya 15,54 persen dari luas daratan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan kepadatan penduduk mencapai 90,76 jiwa/km2.

Sebaliknya, tingkat kepadatan penduduk yang rendah tersebar di wilayah Kecamatan Kampung Rakyat. Kecamatan Kampung Rakyat merupakan daerah yang paling jarang penduduknya, dimana hanya dihuni oleh 80,63 jiwa per kilometer persegi, diikuti Kecamatan Torgamba 89,18 jiwa per kilometer persegi. Hal ini dikarenakan sebagian besar daerah di Kecamatan Kampung Rakyat dan Torgamba merupakan daerah perkebunan.

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024

Kecamatan		Penduduk	Persentase	Kepadatan		
			Penduduk	penduduk		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Sungai Kanan	50 729	15,07	90,76		
2.	Torgamba	116 953	34,75	89,18		
3.	Kotapinang	70 509	20,95	126,65		
4.	Silangkitang	32 402	9,63	92,45		
5.	Kampung Rakyat	65 984	19,60	80,63		
Labuhanbatu Selatan		336 577	100,00	93,60		

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Hasil SP2021

3.3. Status Perkawinan

Pada dasarnya terdapat dua macam bentuk perkawinan. Pertama, menunjukkan perubahan status dari belum kawin menjadi berstatus kawin.

kedua, perubahan dari status cerai menjadi status kawin. Status perkawinan sendiri terbagi menjadi belum kawin, kawin, dan cerai hidup maupun cerai mati.

Penduduk yang berstatus kawin adalah mereka yang terikat dalam perkawinan baik yang tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah, secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri. Penduduk yang cerai hidup adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi termasuk yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum dianggap cerai sedangka cerai mati adalah mereka yang suami/istrinya telah meninggal dunia dan belum kawin lagi. Tabel 3.4 menunjukkan ada sebanyak 54,81 persen penduduk 10 tahun ke atas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berstatus kawin, sedangkan 38,88 persen penduduk berstatus belum kawin dan 6,31 persen berstatus ceri hidup/mati.

Tabel 3. 4 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas menurut Status Perkawinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2024

Status Perkawinan	Persentase			
(1)	(2)			
Belum Kawin	38,88			
Kawin	54,81			
Cerai hidup/mati	6,31			

Sumber: BPS Susenas Maret 2024

3.4. Keluarga Berencana

Upaya penurunan tingkat fertilitas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah dilakukan cukup lama. Penurunan tersebut masih akan terus berlangsung tetapi dengan percepatan yang semakin melambat. Pengalaman menunjukkan bahwa penurunan tingkat fertilitas dipengaruhi oleh meningkatnya faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, selain dikarenakan program KB, penurunan fertilitas juga disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai yang nantinya akan mempengaruhi umur pada saat perkawinan pertama.

Pasangan suami dan istri, dengan usia istri antara 15-49 tahun merupakan sasaran dari program KB. Hal ini disebabkan pada usia tersebut seorang wanita berada pada kemungkinan terbesar untuk melahirkan. Sehingga, untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditargetkan, perlu dilihat tentang alat/cara kontrasepsi yang digunakan oleh akseptor.

Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada tahun 2024 sebanyak 48,89 persen perempuan berumur 15-49 berstatus pernah kawin sedang menggunakan Alat KB ataupun melakukan KB secara tradisional.

Gambar 3. 2 Persentase Perempuan berumur 15-49 pernah kawin menurut partisipasi KB Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2024



Sumber: BPS Susenas Maret 2024

https://abuhanbatusalatankab.hps.go.id



Kesehatan



Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tahun 2024

11,37%



Persentase penduduk yang memiliki BPJS Kesehatan tahun 2024

62,61%



Persentase bayi yang lahir dengan berat badan >2,5 kg tahun 2024

81,15



Persentase perempuan 15-49 tahun yang sedang menggunakan KB

48,89%

https://abuhanbatusalatankab.hps.go.id

BAB 4 KESEHATAN

Sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Masyarakat yang sehat akan menciptakan kehidupan yang berkualitas, karena kesehatan merupakan modal berharga bagi seorang dalam melakukan akivitasnya.

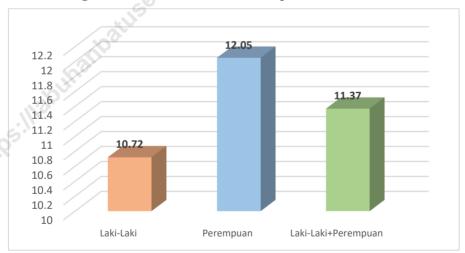
Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem Kesehatan Nasional. Pelaksanaannya diusahakan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan, terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta peningkatan pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat serta sarana penunjangnya terus dilakukan oleh Pemerintah, seperti Puskesmas, Posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Oleh karena itu, pembangunan yang sedang digiatkan pemerintah diharapkan dapat berakselerasi positif.

Bangsa yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Oleh sebab itu, kesehatan menjadi salah satu aspek kesejahteraan dan menjadi fokus utama pembangunan manusia. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata, karena memang salah satu hak dasar rakyat adalah mendapat pelayanan kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di antaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan

sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi makanan bergizi. Tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada pada manusianya sebagai subjek sekaligus objek dari upaya tersebut.

4.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Status kesehatan penduduk bisa dilihat dari tingkat kesakitan atau morbiditas. Tingkat kesehatan didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan atau mengalami sakit, dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam sebulan yang lalu. Jika dilihat menurut jenis kelamin, umumnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2024 perempuan lebih banyak menderita sakit dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



Gambar 4. 1 Tingkat Morbiditas Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2024

Sumber: BPS Susenas Maret 2024

Secara umum, tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah juga dapat dinilai dengan melihat Umur Harapan Hidup (UHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari

hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia. Grafik 4.2 menunjukkan perkembangan UHH Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

72.71 72.46 72

Gambar 4. 2 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2021-2024

Sumber: BPS SP 2020 LF

Umur Harapan Hidup 2024 mencapai 72,71 tahun, yang berarti bayi yang lahir tahun 2024, rata-rata akan hidup mencapai umur 72,71 tahun. Kecenderungan meningkatnya umur harapan hidup ini disebabkan membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi. Hal ini memungkinkan terjadinya perbaikan gizi, kesehatan dan lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan umur harapan hidup.

4.2. Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Salah satu unsur yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dan aman jika dibanding ditolong oleh bukan tenaga medis seperti dukun, famili atau lainnya. Penanganan kelahiran bayi yang kurang baik dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi yang dilahirkan seperti pendarahan, kejang-kejang atau situasi yang lebih berbahaya dapat mengakibatkan kematian pada bayi atau ibu.

Pada tahun 2024 penolong kelahiran balita di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada umumnya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin dimana penolong kelahiran anak lahir hidup terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan adalah sebesar 100 persen.

Gambar 4. 3 Pesentase Wanita 15-49 Tahun Pernah Kawin menurut Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir, 2024



Sumber: BPS Susenas Maret 2024

Selain penolong kelahiran terakhir, unsur lain yang sangat berpengaruh terhadap kualitas proses kelahiran bayi adalah fasilitas tempat melahirkan. Pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Klinik, Praktek Dokter atau Bidan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, atau Polindes menunjukan kualitas pelayanan kesehatan dalam membantu proses kelahiran. Proses kelahiran yang dilakukan di fasilitas kesehatan dianggap lebih aman karena memiliki tenaga medis dan peralatan medis yang lebih memadai sehingga risiko kematian ibu melahirkan menjadi lebih rendah. Pada tahun 2024 kelahiran bayi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada umumnya dilakukan di fasilitas kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan persentase wanita berumur 15-49 tahun pernah kawin yang melahirkan di fasilitas kesehatan adalah sebesar 75,22 persen.



Gambar 4. 4 Persentase Wanita 15-49 Tahun Pernah Kawin menurut Tempat Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir, 2024

Sumber: BPS Susenas Maret 2024

Meskipun demikian masih terdapat sekitar 24,78 persen wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin yang tempat kelahiran terakhirnya dilakukan bukan di fasilitas Kesehatan.

Salah satu indikator penting kesehatan bayi dapat dilihat dari Berat Badan Lahir (BBL). Penimbangan terhadap berat badan bayi yang dilakukan setelah satu jam bayi tersebut dilahirkan. Bayi dikatakan memiliki berat badan normal saat lahir jika beratnya berada pada rentang 2,5 - 4 kg pada bayi yang lahir cukup umur (37-40 minggu).

14%

■ < 2,5 kg
■ 2,5+ kg
■ Tidak ditimbang/tidak tahu

81%

Gambar 4. 5 Pesentase Wanita 15-49 Tahun Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Berat Badan Bayi, 2024

Sumber: BPS Susenas Maret 2024

Pada tahun 2024, bayi yang memiliki berat badan lahir kurang dari 2,5 Kg (BBLR) sebanyak 13,90 persen, sedangkan berat badan lahir lebih dari 2,5 Kg adalah sebesar 81,15 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah, karena berat badan bayi lahir yang kurang dari normal dapat mengindikasikan akan adanya gangguan kesehatannya kelak, apalagi jika tidak segera diperbaiki di awalawal kehidupannya dengan memberikan asupan yang bergizi sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, perlu juga upaya untuk mencegah masalah BBLR

dengan memperhatikan asupan makanan ibu yang sedang hamil dan rutin untuk memeriksakan kandungannya selama masa kehamilan.

https://abuhanbatusalatankab.hps.go.id



https://abuhanbatusalatankab.hps.go.id

BAB 5 PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Hal ini telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan.

Pemerintah berkewajiban "mencerdaskan kehidupan bangsa". Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pada program pembangunan pendidikan nasional yang dilakukan saat ini telah pula mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (Education For All), Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of Child) dan Sustainable Development Goals (SDGs) yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan sosial dan lainnya.

Untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang suatu kemampuan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan sarana yang memadai. Masyarakat diharapkan menggunakan sarana pendidikan dengan baik. Masih kurangnya sarana dari pemerintah dan kurangnya kesadaran kesadaran masyarakat, selalu menjadi kendala dalam dunia pendidikan. Realita ini senantiasa banyak ditemui di Indikator Kesejahteraan Rakyat- Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024

sekeliling kita, yaitu banyak sarana pendidikan yang tidak layak dan juga banyak anak-anak usia sekolah seharusnya belajar, namun sudah harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga.

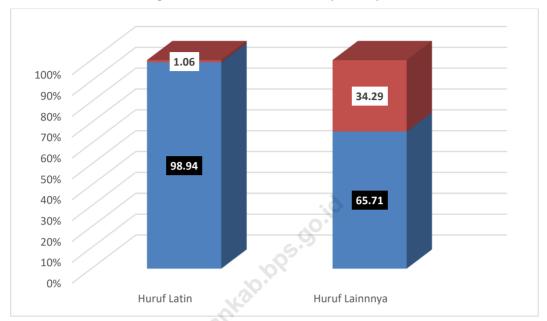
Di tengah keterbatasan inilah pemerintah mencanangkan Program Wajib Belajar Sekolah Dasar enam tahun pada tahun 1984 dan kemudian diikuti dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun mulai tahun 1994. Kebijaksanaan lain sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat adalah melalui program di luar pendidikan formal, di antaranya melalui sekolah-sekolah program jarak jauh. Program atau kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk memberi kesempatan seluasluasnya kepada masyarakat untuk dapat sekolah. Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat diharapkan akan lebih baik dan utamanya tingkat melek huruf terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun).

5.1. Angka Melek Huruf

Indikator makro yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis. Ketidakmampuan membaca dan menulis disebut buta huruf, tingkat buta huruf dapat dijadikan sebagai indikator tingkat pendidikan karena diasumsikan bahwa dengan adanya kemampuan membaca dan menulis seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu melek huruf dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial dan kemajuan suatu bangsa.

Sebanyak 98,94 persen penduduk berusia diatas 15 tahun di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 dapat membaca dan menulis huruf latin, sebesar 65,71 persen dapat membaca dan menulis huruf lainnya.

Gambar 5. 1 Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Persen), 2024



Sumber: BPS Susenas Maret 2024

5.2. Status Pendidikan Penduduk

Partisipasi sekolah dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang sedang bersekolah pada masing-masing kelompok usia sekolah, antara lain umur 7-12 tahun sebagai pendidikan dasar, umur 13-15 tahun sebagai menengah pertama, 16-18 tahun pada pendidikan menengah atas, dan usia 19-23 tahun pada pendidikan tinggi. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Pada umumnya, partisipasi pendidikan dasar masih cukup tinggi, dan angka ini akan semakin menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu indikator ini dapat menunjukkan seberapa banyak penduduk belum atau tidak bersekolah lagi pada kelompok usia sekolah.

Gambar 5.2 menunjukkan persentase Penduduk 7-23 Tahun menurut Status Pendidikan. Pada usia 7-23, sebanyak 77,58 penduduk masih mengikuti jenjang pendidikan mulai dari SD/sederajat hingga Perguruan Tinggi. Penduduk Indikator Kesejahteraan Rakyat- Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024

7-23 Tahun yang masih bersekolah di Labuhanbatu Selatan paling banyak berada di jenjang pendidikan SD/sederajat yaitu sebesar 40,56 persen dan paling sedikit berada di tingkat Perguruan Tinggi yaitu sebesar 4,07 persen.

18.56
14.39
22.41
0.01
14.39
4.07

14.07

Gambar 5. 2 Persentase Penduduk 7-23 Tahun menurut Status Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Persen), 2024

Sumber: BPS Susenas Maret 2024

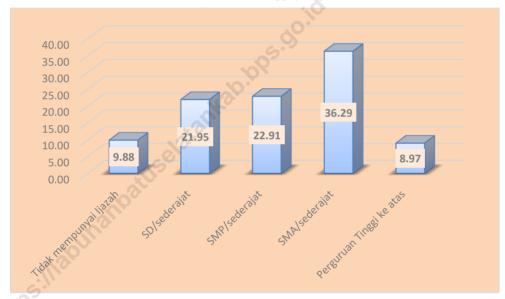
5.3. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan, salah satunya adalah keluhan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Untuk itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah di antaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk.

Dari Gambar 5.3 dapat dilihat persentase penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2024 menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki.

Pada tahun 2024 persentase penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah Perguruan tinggi ke atas sebanyak 8,97 persen. Penduduk yang memiliki ijazah SMA/sederajat sebanyak 36,29 persen, penduduk yang memiliki ijazah SMP/Sederajat sebanyak 22,91 persen, penduduk yang memiliki ijazah SD/Sederajat sebanyak 21,95 persen dan yang tidak punya ijazah SD sebesar 9,88 persen.

Gambar 5. 3 Persentase Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan Usia 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2024



Sumber: BPS Susenas Maret 2024





Sebanyak **7** dari **10** penduduk usia 15 tahun ke atas berpartisipasi dalam **ANGKATAN KERJA (TPAK 71,92 %)**



Sebanyak **3** dari **100** angkatan kerja MENGANGGUR **(TPT 3,24 %)**

Lapangan Usaha Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024



PERTANIAN 47,05 %







INDUSTRI 7,93 %

PERDAGANGAN DAN JASA-JASA 21,95 %



https://abuhanbatusalatankab.hps.go.id

BAB 6 KETENAGAKERJAAN

Tenaga kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Pada analisis ketenagakerjaan ini, digunakan batasan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang terdiri dari angkatn kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya, serta tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja, atau mencari pekerjaan.

Sebagai negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, Tingkat kemakmuran Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Faktor penyebabnya sangat beragam dan kompleks. Namun, salah satu penyebab utamanya adalah tenaga kerja yang walaupun jumlahnya banyak, masih kurang berdaya guna. Ketenagakerjaan di Indonesia masih kurang optimal karena mempunyai masalah yang beragam, diantaranya Tingkat pengangguran tinggi, jumlah angkatan kerja tinggi, tingkat Pendidikan dan keterampilan angkatan kerja yang rendah, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata.

Untuk memberikan gambaran ketenagakerjaan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dalam bagian ini akan disajikan kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilihat dari penduduk usia kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Selain itu juga disajikan secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi status pekerjaan, lapangan pekerjaan dan jam kerja.

6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Untuk memberikan gambaran mengenai keadaan angkatan kerja dan tenaga kerja di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka digunakan 2 (dua) indikator utama, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Penganggguran Terbuka (TPT). TPAK adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari pada suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja pada pasar kerja. Sedangkan TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Pada tahun 2024 jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah 235.891 orang terdiri dari 164.144 orang angkatan kerja dan sisanya 66.294 orang bukan termasuk angkatan kerja. Dari seluruh penduduk usia kerja, 69,58 persen bekerja, 2,33 persen pengangguran, dan 28,08 persen merupakan bukan angkatan kerja (bersekolah, mengurus rumah tangga, kegiatan lainnya).

Hal yang menarik adalah penduduk usia kerja laki-laki lebih banyak yang bekerja (85,06 persen) dibandingkan penduduk usia kerja perempuan (53,34 persen) dan penduduk usia kerja perempuan lebih banyak berstatus sebagai bukan angkatan kerja (mengurus rumah tangga, bersekolah, atau lainnya) sebesar 44,14 persen dibandingkan penduduk usia kerja laki-laki (12,78 persen).

TPAK Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024 adalah 71,92 persen, artinya pada tahun 2024 sebanyak 71,92 persen penduduk usia kerja di Kabupaten Labuhanbatu Selatan siap terjun di pasar kerja baik itu bekerja maupun mencari kerja atau mempersiapkan usaha atau dengan kata lain berstatus sebagai pengangguran terbuka. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki- laki (87,22 persen) lebih besar dari TPAK perempuan (55,86 persen), artinya penduduk usia kerja laki-laki lebih siap terjun di pasar kerja dibandingkan penduduk usia kerja perempuan.

Tabel 6. 1 Penduduk Usia Kerja, Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024

Kegiatan	Laki-Laki Perempuan			Total		
Kegiutun	Jumlah	Jumlah %		Jumlah %		%
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)	(7)
Angakatan kerja	105.340	87,22	64.302	55,86	169.642	71,92
Bekerja	102.742	85,06	61.402	53,34	164.144	69,58
Penganggutan	2.598	2,15	2.900	2,52	5.498	2,33
Bukan Angkatan Kerja	15.441	12,78	50.808	44,14	66.249	28,08
Jumlah	120.781	100,00	115.110	100,00	235.891	100,00
ТРАК		87,22		57,86		71,92
ТРТ		2,47		4,51		3,24

Sumber: Hasil Olah Sakernas, 2024

Pengangguran terbuka menunjukkan angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Pengangguran terbuka juga bisa diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak/sedang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha.

TPT Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 3,24 persen, yang berarti dari setiap 100 angkatan kerja terdapat 3-4 penduduk usia kerja yang Indikator Kesejahteraan Rakyat- Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2024

menganggur. TPT perempuan (4,51 persen) lebih tinggi dari TPT laki-laki (2,47 persen). Hal ini berarti bahwa dari setiap 100 angkatan kerja, penduduk perempuan lebih banyak menganggur dari penduduk laki-laki.

6.2. Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan

Pada tahun 2024, dari seluruh pengangguran di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebanyak 54,19 persen merupakan penduduk laki-laki. Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, sebesar 45,81 persen merupakan pengangguran jenis kelamin perempuan.

Berdasarkan tabel 6.2, dapat kita lihat bahwa penduduk perempuan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menganggur, 84,54 persen merupakan tamatan SMA keatas. Sedangkan penduduk laki-laki yang menganggur, 66,93 persen merupakan tamatan SMA keatas dan sisanya tamatan SMP kebawah.

Tabel 6. 2 Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024

Pendidikan Tertinggi	Laki-Laki Pe		Perem	puan	Total	
yang Ditamatkan	Jumlah	%	Jumlah %		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<= SD	517	16,36	312	11,68	829	14,22
SMP	528	16,71	101	3,78	629	10,79
SMA Umum	961	30,41	1.034	38,71	1.995	34,21
SMA Kejuruan	846	26,77	779	29,17	1.625	27,87
D1-D3	0	0,00	152	5,69	152	2,61
Universitas	308	9,75	293	10,97	601	10,31
Jumlah	3.160	100,00	2.671	100,00	5.831	100,00
Pengangguran (%)	54,19		45,81		100,00	

Sumber: Hasil Olah Sakernas, 2024

6.3. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Sektor perdagangan dan jasa merupakan sektor yang dominan bagi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pada tahun 2024, sebanyak 47,05 persen penduduk Labuhanbatu Selatan bekerja di bidang pertanian, kemudian diikuti bidang perdagangan dan jasa sebesar 45,02 persen dan sisanya 7,93 persen di bidang industri.

Tabel 6. 3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha Tahun 2024

Lapangan Usaha	Laki-Laki Pe		Perem	puan	Total	
Lapangan Osana	Jumlah	mlah % Jumlah		%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian	60.772	59,15	16.465	26,82	77.237	47,05
Industri	9.011	8,77	4.000	6,51	13.011	7,93
Perdagangan dan Jasa	32.959	32,08	40.937	66,67	73.896	45,02
Jumlah	102.742	100,00	61.402	100,00	164.144	100,00

Sumber: Hasil Olah Sakernas, 2024

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagian besar bekerja di bidang pertanian sebesar 59,15 persen, kemudian diikuti bidang perdagangan dan Jasa sebesar 32,08, sisanya sebesar 8,77 persen bekerja di bidang industri. Sedangkan penduduk perempuan sebagian besar bekerja di bidang perdagangan dan jasa sebesar 66,77 persen, kemudian diikuti bidang pertanian sebesar 26,82, sisanya sebesar 6,51 persen bekerja di bidang Industri.

6.4. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Status pekerjaan dibagi menjadi 7 jenis, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja keluarga.

Tabel 6. 4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan Tahun 2024

Status Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Total	
Status r ekerjaan	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha sendiri	13.204	12,85	11.899	19,38	25.103	15,29
Berusaha dibantu buruh tidak	10.540	10,26	13.729	22,36	24.269	14,79
tetap/tidak dibayar	10.540	10,20	13.723	22,30	24.209	14,79
Berusaha dibantu buruh	9.081	8,84	1.841	3,00	10.922	6,65
tetap/dibayar	9.061	0,04	1.041	3,00	10.922	0,03
Buruh/karyawan/pegawai	54.708	53,25	20.543	33,46	75.251	45,84
Pekerja bebas di pertanian & non pertanian	10.049	9,78	1.216	1,98	11.265	6,86
Pekerja keluarga/tidak dibayar	5.160	5,02	12.174	19,83	17.334	10,56
Jumlah	102.742	100,00	61.402	100,00	164.144	100,00

Sumber: Hasil Olah Sakernas, 2024

Tabel 6.4 menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 45,84 persen, kemudian diikuti berusaha sendiri (15,29 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar (14,79 persen). Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, pekerja perempuan yang berstatus pekerja keluarga lebih banyak yaitu sebesar 19,83 persen dibandingkan pekerja laki-laki sebesar 5,02 persen.



Taraf & Pola Konsumsi

Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2024



Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2024



https://abuhanbatusalatankab.hps.go.id

BAB 7 TARAF DAN POLA KONSUMSI

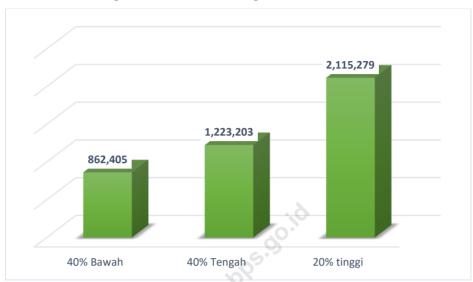
7.1. Perkembangan Pola Konsumsi

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan pada tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga, yang dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Di negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, di negara yang relatif sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa seperti untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sejenisnya merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumah tangga. Perubahan angka persentase tersebut dalam setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf hidup rumah tangga.

Salah satu informasi dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pengeluaran rumah tangga. Hal ini disebabkan pengumpulan data pendapatan masyarakat sulit diperoleh. Masyarakat cenderung memberi informasi yang lebih rendah tentang pendapatan yang diperoleh.

Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok penduduk 40% bawah, 40% tengah, dan 20% tinggi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2024 ada lah masing-masing sebesar Rp. 862.405, Rp. 1.223.203, dan Rp. 2.115.279, dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sebesar Rp. 1.256.423.

Gambar 7. 1 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2024

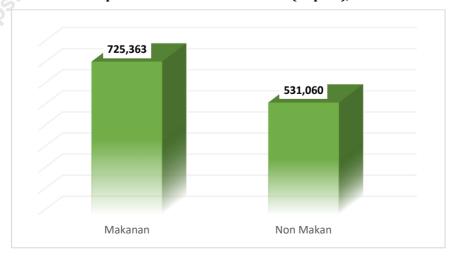


Sumber: BPS Susenas Maret 2024

7.2. Pengeluaran Per Kapita

Pada tahun 2024, pengeluaran perkapita untuk konsumi makanan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan lebih tinggi yaitu sebesar Rp 725.363, sedangkan untuk konsumsi bukan makanan sebesar Rp 531.060.

Gambar 7. 2 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Kabupaten di Labuhanbatu Selatan (Rupiah), 2024



Sumber: BPS Susenas Maret 2024



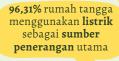
Perumahan dan Lingkungan



75,84% penduduk Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 menempati **rumah milik sendiri**



93,95% rumah tangga memiliki kloset leher angsa







45,99% rumah tangga sumber air minum utamanya berasal dari air kemasan bermerk/isi ulang/leding



https://abuhanbatusalatankab.hps.go.id

BAB 8 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, disamping kebutuhan sandang dan pangan. Rumah berfungsi sebagai tempat tinggal serta digunakan untuk berlindung dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya. Rumah juga merupakan tempat berkumpulnya anggota keluarga untuk menghabiskan sebagian besar waktunya.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Secara umum rumah dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (Pedoman Teknis Penilaian Rumah Sehat, Depkes RI, 2007)

- Memenuhi kebutuhan psikologis antara lain privacy yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah, adanya ruangan khusus untuk istirahat (ruang tidur), bagi masingmaing penghuni;
- 2. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan penghawaan yang cukup;

- Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena pengaruh luar dan dalam rumah, antara lain persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi bangunan rumah, bahaya kebakaran dan kecelakaan di dalam rumah;
- Memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu;
- 5. Rumah sehat juga dapat diartikan sebagai rumah yang mempunyai ruangan terorganisir. Beberapa ruangan pokok yang wajib ada pada sebuah rumah tinggal yaitu ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas dari sebuah rumah, diperlukan juga ruangan-ruangan tambahan yang memiliki fungsi khusus seperti ruang keluarga, ruang makan, ruang mencuci, dan sebagainya.

8.1. Kondisi dan Fasilitas Rumah Tinggal

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Salah satu hal yang dapat menggambarkan kesejahteraan penduduk adalah keadaan tempat tinggal. Tingkat kelayakan tempat tinggal dapat dilihat dari kondisi rumah tinggalnya, yaitu status kepemilikan rumah, luas lantai rumah, jenis atap rumah, dinding rumah, dan jenis lantai rumah.

Berdasarkan informasi pada Tabel 8.1 sebagian besar masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendiami rumah milik sendiri yaitu sebesar 75,84 persen tahun 2024 meningkat dari 73,59 persen pada tahun 2023. Kemudian 24,16 persen mendiami rumah bukan milik sendiri (mencakup kontrak/sewa) tahun 2024 menurun dari 26,41 persen pada tahun 2023.

Sanitasi yang buruk dan air minum yang tidak higienis bisa mempengaruhi kesehatan, khususnya pada anak-anak. Mereka menjadi rentan terkena penyakit seperti diare, polio, pneumonia, hingga penyakit kulit. Berdasarkan Tabel 8.1, pada tahun 2024 sebesar 48,93 persen rumah tangga di Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggunakan air kemasan bermerk/air isi ulang/leding sebagai sumber air utama yang digunakan untuk air minum. Persentase ini meningkat sebesar 2,94 persen poin dibandingkan tahun 2023. Kemudian sumber air yang berasal dari sumur bor/pompa/sumur terlindung/mata air terlindung/air hujan sebesar 46,37 persen, dan yang menggunakan sumber air minum lainnya sebesar 4,71 persen.

Fasilitas sanitasi yang layak adalah dilihat dari kepemilikan toilet pribadi berupa leher angsa dan adanya sambungan toilet dengan tangki septik. Pada tahun 2024 hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah mempunyai fasilitas buang air besar dan 92,78 persen diantaranya sudah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri. Dari seluruh rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar, sebanyak 93,95 persen menggunakan kloset leher angsa dan sisanya 6,05 persen menggunakan jenis kloset lainnya seperti plengsengan dan cubluk/cemplung. Sebanyak 83,84 persen menggunakan tangki/IPAL sebagai tempat pembuangan akhir kotoran, dan 16,16 persen dibuang di kolam/sawah/ sungai/danau/laut ataupun ke tempat lainnya seperti lubang tanah, pantai, tanah lapang, kebun dll.

Tabel 8. 1 Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi dan Fasilitas Rumah Tinggal di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023/2024

Kondisi Rumah	%Rumah Tangga		Kondisi Rumah	%Rumah Tangga			
Kondisi Kuman	2023	2024	Konuisi Kuman	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1. Kepemilikan Rumah			4. Tempat Pembuangan Akhir Tinja				
Milik Sendiri	73,59	75,84	Tangki Septik	92,83	83,84		
Bukan Milik Sendiri	26,41	24,16	• Lainnya	7,17	16,16		
2. Penggunaan Fasilitas buang Air			5. Sumber air minum utama untuk				
Besar			mandi/cuci/lainnya				
Sendiri	90,94	92,78	Air kemasanbermerk/air isi	45,99	48,93		
• <u>Lainnya</u>	9,06	7,22	ulang/leding				
3. Jenis Kloset yang	g Digunakar	1 770	• Sumur	53,52	46,37		
leher angsa	93,87	93,95	bor/pompa/sumur				
• Lainnya	6,13	6,05	Sumur				
	NO INTE		bor/pompa/sumur				
·III3pill			terlindung/mata air				
			terlindung/air hujan				
:462.			• Lainnya	0,49	4,71		

Sumber: BPS Susenas Maret 2024

BAB 9

Kemiskinan

"Tren Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2015-2024"



- GK Garis kemiskinan Labuhanbatu Selatan Rp 533.535
- Indeks kedalaman kemiskinan Labuhanbatu Selatan 0,93
- P2 Indeks keparahan kemiskinan Labuhanbatu Selatan 0,16



2024



https://abuhanbatusalatankab.hps.go.id

BAB 9 KEMISKINAN

9.1. Perkembangan Penduduk Miskin

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah/ negara Indonesia adalah kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multi-dimensional yang menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, karena aspek dasar yang dapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan.

Kemiskinan menjadi masalah di hampir semua negara baik negara maju atau negara yang sedang berkembang. Meskipun fenomena kemiskinan itu merupakan sesuatu yang kompleks dalam arti tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi-dimensi lain di luar ekonomi, namun selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya berada dalam lingkungan dimensi ekonomi (Nanga, 2006).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi minimal sebesar 2100 kilokalori perhari ditambah kebutuhan dasar bukan makanan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa

lainnya. Patokan 2100 kilokalori ditentukan berdasar pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978 yang menyatakan seseorang dapat dikatakan hidup sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya minimal sebesar 2100 kilokalori perhari.

Gambar 9. 1 Tren Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2015-2024



Sumber: BPS Susenas 2015 - 2024

Berdasarkan hasil Susenas, persentase penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu Selatan menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2016, persentase penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 11,49 persen turun menjadi 7,73 persen pada tahun 2024. Namun selama rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, terjadi kenaikan persentase penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu pada tahun 2021 naik menjadi 8,53 persen dari sebelumnya 8,34 persen pada tahun 2020.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kemiskinan di suatu daerah selain dari jumlah dan persentase penduduk miskin adalah kedalaman dan

keparahan kemiskinannya. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing- masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index - P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Sedangkan garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Tabel 9. 1 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2024

Indeks	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,22	1,04	0,94	0,93
Indeks Keparahan kemiskinan (P2)	0,26	0,26	0,18	0,16
Garis Kemiskinan (Rupiah)	426 574	448 994	486 275	533 535

Sumber: BPS Susenas 2021 - 2024

Tabel 9.1 menunjukkan bahwa Indeks kedalaman kemiskinan (P1) tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan dilihat dari keparahannya tahun 2021-2023 lebih parah dari pada tahun 2024. Sejalan dengan indeks kedalaman kemiskinan yang paling rendah diantara tahun- tahun sebelumnya, selama periode 2021-2024, garis kemiskinan tertinggi berada di tahun 2024 sebesar Rp 533.535.

https://abuhanbatusalatankab.hps.go.id





MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan

JI.Lintas Kotapinang-Gunung Tua, Depan Rumah Dinas Wakil Bupati, Desa Hadundung, Kotapinang Homepage: labuhanbatuselatankab.bps.go.id E-mail: bps1222@bps.go.id

